

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Sebagai acuan dalam kerangka fikir, maka penulis menjelaskan beberapa teori yang menjadi dasar dalam proposal ini untuk menunjang relevansi permasalahan yang ada.

a. Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani atau memenuhi. *Administratio* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan (Syafri, 2012;3).

Menurut Herbert, 1970 (dalam Syafri, 2012 : 8) administrasi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Leonard, 1958 (dalam Syafri, 2012 : 9) administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil.

Menurut Sondang, 2008 (dalam Syafri, 2012 : 9) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dwight, 1948 (dalam Syafri, 2012 : 10) menyebut bahwa administrasi sebagai “Cooperative Rational Action” yang artinya usaha kerja sama yang rasional. Maka tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasi tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang

minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki. Maka inti dari pendapat diatas adalah :

1. Administrasi adalah kegiatan.
2. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka kerja sama kelompok orang.
3. Rangkaian kerja sama itu dilakukan secara efisien.
4. Rangkaian kegiatan kerja sama yang efisien itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dalam administrasi, wadah yang mengatur tersebut adalah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. (Syafri, 2012:11).

Dapat dikatakan bahwa ilmu administrasi sangat berhubungan dengan publik atau orang banyak. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja memerlukan perintah dari instansi yang saling terkait dan memiliki tujuan bersama. Menurut Syafri (2012 : 11) para sarjana ilmu administrasi telah sepakat bahwa adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata Usaha
8. Hubungan masyarakat

b. Organisasi

Organisasi adalah unsur utama bagi kelompok yang saling bekerja sama, organisasi sebagai wadah penggerak didalam menjalankan aktifitas bagi pencapaian tujuan. Menurut Syafri (2012 ; 12) organisasi berwujud sebagai kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang, pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada.

Sebagai yang telah dijelaskan diatas, bahwa ilmu administrasi membutuhkan seorang administrator yang dapat menjalankan organisasi secara efisien dan efektif. Berhubung organisasi merupakan salah satu faktor dari ilmu administrasi, maka pencapaian hasil yang efektif dan efisien tersebut harus secara optimal.

Siagian (dalam zulkifli, 1986; 41) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Namun berbeda dengan atmosudirdjo (dalam Zulkifli dan Moris, 2009 : 39) bahwa :

1. Organisasi itu harus memiliki tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dicapai melalui daya upaya kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan.
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogen.

3. Antara tugas, tanggung jawab dan kekuasaan harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya luas dan beratnya tanggung jawab yang diberi harus sesuai dengan luas dan beratnya tugas.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan sejelas-jelasnya.
5. Kesatuan komando atau hierarki
6. Komunikasi
7. Kewajiban pimpinan
8. Kontinuitas
9. Saling asuh
10. Koordinasi
11. Kehayatan
12. Tahu diri

c. Manajemen

The Liang Gie, 1993:14 (dalam Zulkifli dan Moris, 2009 : 45) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses terdiri atas enam fungsi yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah langkah awal yang dilakukan pelaku organisasi untuk membuat sebuah tujuan awal yang akan dilakukan. Perencanaan (Planning) biasa dilakukan untuk memudahkan pelaku organisasi dalam melaksanakan langkah selanjutnya.

2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengkoordinasian

5. Pengontrolan
6. Penyempurnaan

Menurut Sondang P.Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

d. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Marihot Tua E.H, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal diatas Marihot Tua (2002) mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan

berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

e. Teori Kebijakan

Kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan, Ibrahim (2004:2)

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menempati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.

- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah lembaga pemerintah yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.
- d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahaan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*)
- e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
- g. Model sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

F. Konsep evaluasi

Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut ndraha adalah :

- a) Model *befora-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;
- b) Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya;
- c) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan).

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya.

Suchman(dalam Winarno,2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

G. Teori Kepariwisata

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Keperawisataan adalah:

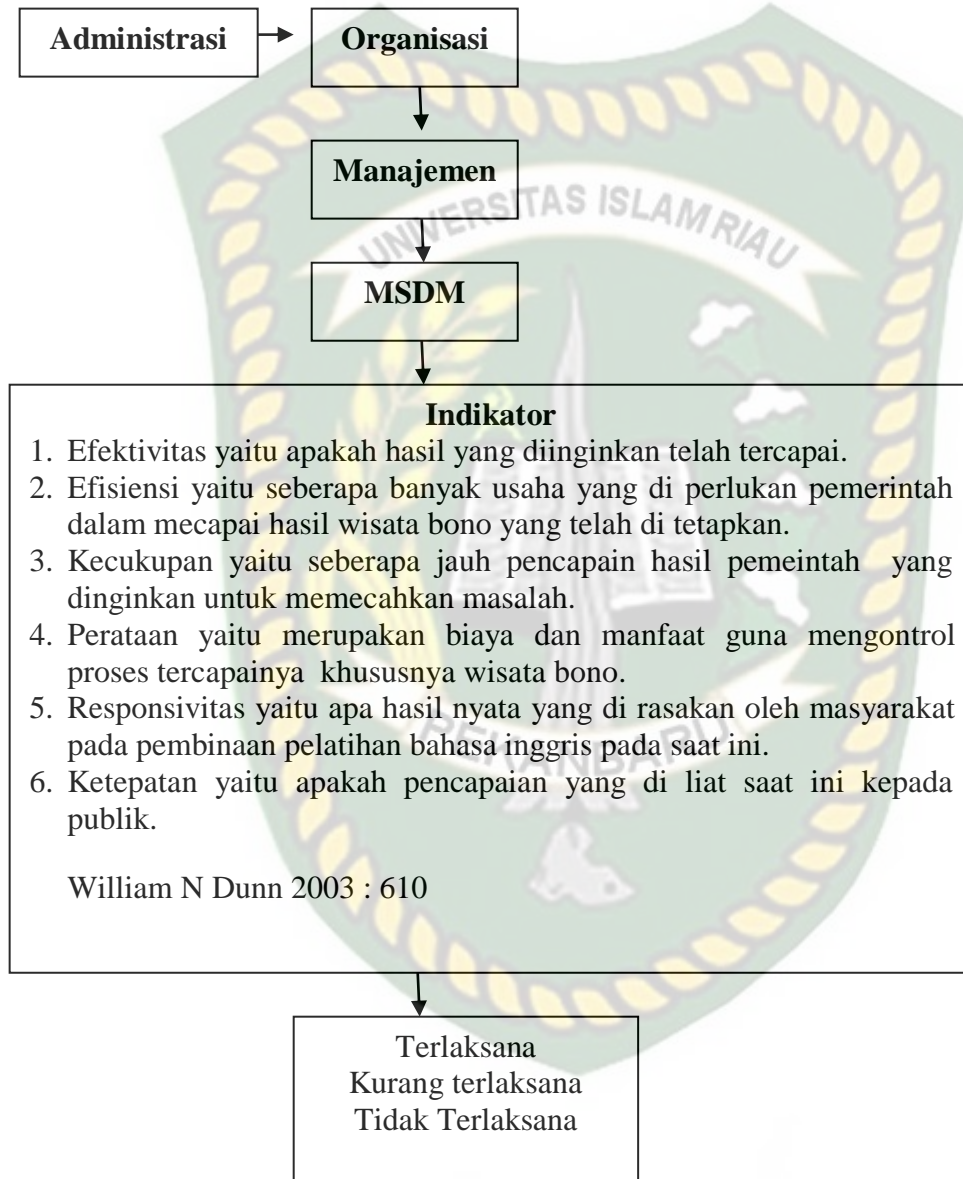
- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara (pasal 1 ayat 1)
- b) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (pasal 1 ayat 2)
- c) Parawisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai macam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 1 ayat 3)
- f. Teori pengembangan Wisata

Untuk mendukung agar pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan maka diperlukan semua fasilitas prasarana dan sarana kepariwisataan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Salah satu sektor penentu keberhasilan pariwisata diperlukan promosi. Bagian terpenting dari sebuah perusahaan, organisasi bahkan industri pemerintah, baik yang bersifat komersial maupun yang non komersial dalam mempromosikan suatu aset yang dimiliki dilihat dari strategi promosinya. Ibarat suatu gunung es, maka strategi tindakan adalah bagian yang berada dibawah permukaan air. Upaya kegiatan mempromosikan tempat kunjungan wisata di daerah tidak semudah dengan kegiatan serupa yang dilakukan untuk produk-produk perusahaan. Promosi tempat tujuan wisata sangat diperlukan oleh daerah-daerah yang memiliki banyak potensi di tanah air. Promosi tempat wisata yang dirancang dengan baik akan memberikan tambahan penerimaan asli daerah, dan mendorong proses multiplier perkembangan ekonomi lokalitas di sekitar daerah tujuan wisata tersebut.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Gambar 11.I : Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan



Sumber : Olahan Penulis 2017

C. Konsep Operasional

1. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dievaluasi dalam penelitian ini maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan kemitraan wisata bono adalah : Dalam pembangunan objek wisata yang layak dan menarik sekaligus peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara yang datang ke Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan memastikan kelanjutan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Pelalawan tahun 2017. Ternyata selain Wisata Ombak Bono yang sudah mendunia, Pelalawan punya destinasi lain yang tidak kalah menarik. Pengembangan objek wisata oleh Pemkab Pelalawan tahun ini difokuskan pada objek wisata Bono dan Danau Tajwid yang berada di Langgam. Dimana untuk pengembangan wisata Danau Tajwid, sudah mulai dirintis pembangunannya..
- b. Penilaian Program pemerintah kabupaten Pelalawan Studi Pada Pengembangan kemitraan Wisata Bono Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah: Pelaksanaan program pemerintah kabupaten pelalawan yang dilaksanakan oleh kantor Dinas Parawisata pemuda Dan olahraga yang di kembangkan berdasarkan pencapaian visi misi bupati pelalawan tahun 2016-2021 yang telah di tetapkan.

D. Operasional Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1.	2.	3.	4.	5.
<p>Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.</p> <p>Menurut William N Dunn (2003:608-610)</p>	<p>Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan</p>	1. Efektifitas	<p>a. Proses program pengembangan kemitraan wisata bono</p> <p>b. Pelatihan bahasa inggris kepada pramuwisata.</p>	Nominal
		2. Efisiensi	<p>a. dalam mencapai hasil wisata bono yang telah di tetapkan.</p> <p>b. dalam langkah konkrit yang harus di lakukan pemerintah daerah</p>	Nominal
		3. Kecukupan	<p>a. seberapa pencapaian hasil yang di liat dalam pemberdayaan pemerintah terhadap masyarakat</p> <p>b. hasil apa yang nyata di rasakan masyarakat pada saat ini</p>	Nominal
		4. Perataan	<p>a. pencapaian yang di liat saat ini kepada publik.</p> <p>b. persoses mengenai pengembangan kemitraan pramuwisata yang diterapkan dalam ketentuan</p>	Nominal
		5. Responsivitas	<p>a. Koordinasi dinas pariwisata dengan Organisasi BRC yang terkait di kelurahan teluk meranti dalam pengembangan kemitraan wisata bono.</p>	Nominal

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Perpustakaan Universitas Islam Riau</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Dokumen ini adalah Arsip Miik :</p>		6. Ketepatan	<p>b. Kompetensi/kemampuan masyarakat dalam mempelajari bahasa inggris selama di adakan pelatihan bahasa inggris.</p> <p>a. penetapan pegawai yang ditugaskan dalam platihan Bahasa Inggris dan pembinaan pembentukan desa sudah tepat atau tidak</p> <p>b. kompetensi/ kemampuan kerja yang bapak/ibu berikan dalam melakukan program pengembangan kemitraan pramuwisata yang ditetapkan dalam renstra dinas kebudayaan kepemudaan dan olahraga</p>	<p>Nominal</p> <p>Nominal</p> <p>Nominal</p>

Sumber : Olahan Penulis 2017

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah: Baik, Cukup Baik, Tidak Baik. Untuk melihat hasil Proses penilaian Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Eksotis Pengembangan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan) maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut:

Terlaksana	:Apabila semua indikator Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan) berkisar 67%-100%.
Kurang Terlaksana	:Apabila penilaian indikator Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan) berkisar dengan 33%-66%.
Tidak Terlaksana	:Apabila penilaian indikator Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan) berkisar berkisar 0%-33%

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya program-program dan sumber daya pendukung yang diberikan dalam penilaian Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan

Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 4 sub indikator tersebut, berkisar 67 % - 100%.

Kurang Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya program-program dan sumber daya pendukung yang diberikan dalam Proses penilain Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 3 sub indikator tersebut, berkisar 34% - 66%.

Tidak Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya program-program dan sumber daya pendukung yang diberikan dalam Proses penilaian Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 2 sub indikator tersebut, berkisar 0% - 33%.

2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang di perlukan pemerintah dalam mencapai hasil wisata bono yang telah di tetapkan.

Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya sebuah usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Proses penilaian Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan Kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 67 % - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya sebuah usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Proses penilai pengembang wisata bono dari 2 sub indicator tersebut, berkisar 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya sebuah usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Proses penilai pengembangan Kemitraan wisata bono yang terdiri dari sub 1 indicator tersebut, berkisar 0% - 33%.

3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil pemerintah yang diinginkan untuk memecahkan masalah.

Terlaksana : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 3 sub indikator tersebut, berkisar 67% - 100%.

Kurang Terlaksana : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses pengembangan Kemitraan wisata bono yang terdiri dari 2 sub indikator tersebut, berkisar 34% - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak

usaha yang dilakukan dalam Proses Pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 1 sub indikator tersebut,berkisar 0% - 33

4. . Perataan yaitu merupakan biaya dan manfaat guna mengontrol proses tercapainya pengembangan kemitraan wisata bono

Terlaksana	:Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan Pemerintah dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 2 sub indikator tersebut,berkisar 67 % - 100%.
Kurang Terlaksana	:Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan Pemerintah dalam Proses pengembang kemitraan wisata bono yang terdiri dari 1 sub indikator tersebut,berkisar 34% - 66%.
Tidak Terlaksana	:Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian dalam memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas dan Pemerintah dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang memiliki tidak ada memenuhi sub indikator tersebut,berkisar 0% - 33%.

5. Responsivitas yaitu apa hasil nyata yang di rasakan oleh masyarakat pada pembinaan pelatihan bahasa inggris saat ini

Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 3 sub indikator tersebut,berkisar 67 % - 100%.

Kurang Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 2 sub indikator tersebut,berkisar 34% - 66%.

Tidak Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses Pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 1 sub indikator tersebut,berkisar 0% - 33%.

6. Ketepatan yaitu apakah pencapaian yang di liat saat ini kepada publik

Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 3 sub indikator tersebut,berkisar 67 % - 100%.

Kurang Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 2 sub indikator tersebut,berkisar 34% - 66%.

Tidak Terlaksana :Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang adanya penilaian pada hasil atau seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam Proses Pengembangan kemitraan wisata bono yang terdiri dari 1 sub indikator tersebut,berkisar 0% - 33%.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau